

KATA PENGANTAR



Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas penggunaan anggaran tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Capaian Kinerja.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang telah berhasil dicapai dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang baik bidang teknis maupun non teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.

Palembang, Februari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



Dr. H. Soedarmadji
Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum
NIP. 19560405 198203 1 005